

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Mahadewi & Krisnadewi (2017) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. *Principal* yang dimaksud adalah pemegang saham atau investor dan *agent* adalah pihak manajemen atau manajer yang mengelola perusahaan. Teori keagenan merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi kontrol (manajemen) yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan dengan fungsi kepemilikan (pemegang saham).

Teori keagenan menggunakan 3 (tiga) asumsi sifat dasar manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Eisenhardt dalam Lidiawati & Asyik, 2016).

Pembahasan mengenai manajemen laba berkaitan dengan teori keagenan, dimana dalam teori keagenan menyatakan adanya praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer (*agent*) dimana mereka saling mengedepankan kepentingan masing-masing demi memaksimalkan utilitasnya. Adanya perbedaan pemikiran antara *agent* dan *principal* dalam mengendalikan perusahaan menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan *principal*, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik ini terjadi karena *agent* tidak bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan individu *agent* dengan mengorbankan kepentingan pemilik (Lestari & Ningrum, 2018).

Manipulasi data yang dilakukan dalam laporan keuangan berupa praktik manajemen laba. Manajemen laba terjadi ketika *agent* lebih memilih *judgement* dalam memilih transaksi yang dapat mengubah penyusunan laporan keuangan. Praktik tersebut dapat menurunkan kepercayaan *principal* kepada *agent* dan jika keadaan tersebut tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan konflik agensi yang berdampak buruk pada kedua belah pihak. Menurunnya kepercayaan antara *principal* kepada *agent* dapat diatasi dengan adanya konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional dan juga dengan melakukan kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berdampak bagi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemerintah dan lain sebagainya.

Kebijakan *principal* kepada *agent* untuk melakukan prinsip konservatisme akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan serta biaya agensi yang muncul akibat dari asimetri informasi (Lafond dan Watts, 2006 dalam Andreas, dkk, 2017). Kepemilikan institusional dapat meminimalisasi adanya konflik kepentingan antara *principal* kepada *agent*. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kegiatan pengungkapan CSR dapat menambah nilai perusahaan yang menguntungkan bagi pihak *agent*. Karena dengan pengungkapan tersebut, *principal* menganggap bahwa *agent* sudah menjalankan tugas yang diberikan sesuai apa yang diinginkan *principal*. Hal itu, dapat meningkatkan kembali kepercayaan *principal* kepada *agent* sebagai pengelola perusahaan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu tindakan campur tangan dari pihak manajemen dalam penyusunan dan pelaporan keuangan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Manajemen laba merupakan sebuah fenomena yang sampai saat ini masih diperdebatkan mengenai pemahaman etis dan tanggung jawab sosialnya. Manajemen laba berada di *grey area* antara sebuah kecurangan dan merupakan aktivitas yang

diinginkan oleh prinsip akuntansi. Pada umumnya tujuan pihak manajemen melakukan praktek manajemen laba untuk memaksimalkan kesejahteraan pihak manajemen, memanipulasi besaran laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan mempengaruhi hasil perjanjian yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan, pihak-pihak yang berkepentingan serta nilai pasar.

Healy & Wahlen (1989) dalam Pranasari (2017) mengatakan manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan dalam pelaporan keuangan dan penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholders* tentang performa perusahaan atau untuk kontrak yang didasarkan pada angka dalam laporan keuangan. Sedangkan Fischer & Rosenzwich (1995) dalam Arthawan & Wirasedana (2018) mengatakan bahwa banyak manajer menganggap praktik manajemen laba adalah tindakan yang wajar dan etis serta merupakan alat sah manajer dalam melakukan tanggung jawabnya untuk mendapatkan keuntungan atau *return* perusahaan.

Menurut Pranasari (2017) terdapat berbagai motivasi mengapa manajer melakukan manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus Scheme*

Banyak perusahaan yang berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan dalam hal ini manajer dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus. Setelah mencapai target yang telah ditetapkan, laba sering

dijadikan sebagai indikator penilaian manajer perusahaan dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu.

2. *Other Contractual Motivation*

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual.

3. *Political Motivations*

Untuk mengurangi *political cost* dan pengawasan dari pemerintah, pemerintah biasanya memberikan perhatian khusus pada perusahaan yang menjadi sorotan publik, misalnya karena memiliki banyak karyawan, menguasai sebagian besar dalam pangsa pasar dalam pemasaran produk industri tertentu, dan lain-lain. Dalam kasus ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menaikkan laba.

4. *Taxation Motivations*

Manajer juga melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, manajer berusaha untuk menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

5. *Change of CEO*

Manajer melakukan manajemen laba salah satunya agar kinerjanya dinilai baik. Dalam kasus pergantian manajer biasanya diakhir tahun tugasnya, manajer akan melaporkan laba yang tinggi sehingga CEO yang baru akan merasa sangat berat mencapai laba tersebut.

6. *Initial Public Offerings (IPO)*

Manajer melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan bertujuan untuk mempengaruhi pasar, yaitu persepsi investor dalam rangka *go public*, perusahaan pembuat laporan keuangan cenderung mempertinggi laba. Tindakan mempertinggi laba dilakukan dalam usaha memaksimalkan penerimaan (*proceeds*) dari penawaran saham perdana perusahaan tersebut.

7. *To Communicate Informations to Investors*

Manajer melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan tersebut terlihat baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan.

Menurut Fatmawati (2018) terdapat beberapa bentuk manajemen laba yang dapat dilakukan manajer, antara lain:

1. *Taking a bath*

Taking a bath adalah manajer melakukan metode dengan mengakui biaya-biaya dan kerugian periode yang akan datang pada periode berjalan ketika pada periode berjalan terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan.

2. *Income minimization*

Income minimization adalah manajer melakukan praktik manajemen laba dengan mengakui secara lebih cepat biaya-biaya, seperti biaya pemasaran, riset dan pengembangan, ketika perusahaan memperoleh profit yang cukup besar dengan tujuan untuk mengurangi perhatian politis.

3. *Income maximization*

Income maximization adalah manajer melakukan praktik manajemen laba dengan upaya memaksimalkan laba yang dilaporkan.

4. *Income smoothing*

Income smoothing adalah manajer melakukan praktik manajemen laba dengan menaikkan atau menurunkan laba, dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan, sehingga perusahaan tampak stabil dan tidak beresiko.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Perubahan metode akuntansi

Mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya:

- a. Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*).
- b. Mengubah periode depresiasi.

2. Memainkan kebijakan akuntansi

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan *judgment* (kebijakan) perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun estimasi, misalnya:

- a. Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tak tertagih.
- b. Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi.

- c. Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan manajemen (sering disebut manipulasi keputusan operasional), misalnya:
 - a. Mempercepat ataupun menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
 - b. Mempercepat ataupun menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.
 - c. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat ataupun menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
 - d. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
 - e. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai.

2.1.2 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme dapat didefinisikan sebagai praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespon berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespon berita baik (*good news*) (Sarra, 2017). Definisi formal mengenai konservatisme ada dalam SFAC No. 2 yaitu bahwa konservatisme merupakan reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian dalam mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko pada suatu bisnis telah dipertimbangkan. Implikasi dari penerapan ini adalah pilihan metode akuntansi ditunjuk pada metode yang melaporkan laba dan aktiva rendah atau hutang lebih tinggi (Gustina, 2018).

Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka pendapatan dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya cenderung tinggi. Akibatnya, laporan keuangan akan menghasilkan laba yang terlalu rendah (*understatement*). Sehingga konservatisme merupakan suatu reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian dan dalam penyusunan laporan keuangan cenderung mempercepat pengakuan biaya namun memperlambat pengakuan pendapatan. Jika akuntansi menganut konsep dasar konservatisme dalam menyikapi ketidakpastian, akuntansi (penyusunan standar) akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada munculnya (keadaan, harapan, kejadian atau hasil) yang dianggap kurang menguntungkan.

Konservatisme mempunyai 2 (dua) jenis laba, yaitu: (1) *ex-ante conservatism* atau *news-independent conservatism* dan (2) *ex-post conservatism* atau *news dependent conservatism*. *Ex-ante conservatism* atau *news-independent conservatism* berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi laba secara independen dari kejadian-kejadian ekonomi saat ini, bahkan apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut berkaitan secara positif dengan harapan aliran kas dimasa yang akan datang. *Ex-post conservatism* atau *news dependent conservatism* menggambarkan ketepatan waktu untuk pengakuan laba terhadap *bad news* daripada *good news*.

Menurut Liyanto & Anam (2019) dalam penelitian akademis, konservatisme dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Konservatisme tak bersyarat (*unconditional conservatism*)

Konservatisme tak bersyarat adalah bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah pada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual.

2. Konservatisme bersyarat (*conditional conservatism*)

Konservatisme bersyarat mengacu pada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”.

Konservatisme merupakan prinsip yang penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi oleh ketidakpastian (Gustina, 2018). Prinsip kehati-hatian dalam konservatisme akuntansi adalah mengakui aset dan laba, namun segera mengakui beban dan kewajiban karena aktifitas bisnis dan ekonomi dilingkupi oleh ketidakpastian.

Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham. Prinsip konservatisme dianggap dapat bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksi laba dan kondisi keuangan perusahaan pada masa yang akan datang, karena dengan menggunakan prinsip konservatisme, perusahaan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (Purnama, 2017). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Dwijayanti & Suryanawa, 2018). Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan (*source of power*) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen (Putri & Putra, 2017).

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar (Feranika dkk, 2018). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi *opportunistic* manajer. *Institutional shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan (Nugroho dan Suwitho, 2019). Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja para manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Rais & Santoso, 2017).

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain; (1) memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi, (2) memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan (Andriyani & Mudjiyanti, 2017). Kepemilikan institusional juga bagian dari cara untuk meminimalisir *agency cost* karena pemilik saham akan menunjuk manager untuk mengelola perusahaan dengan tujuan dapat meningkatkan nilai perusahaan serta kesejahteraan pemilik saham (Rais & Santoso, 2017). Kepemilikan institusional dapat menekankan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan.

2.1.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar tempat beroperasi. CSR adalah sikap perusahaan yang memegang komitmen pada *stakeholders* perusahaan untuk melakukan tanggung jawabnya atas dampak operasi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan menurut *The World Business Council for Sustainable Development* adalah sebuah komitmen bisnis yang terus menerus dilakukan oleh perusahaan untuk bertindak etis serta mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup karyawan, masyarakat lokal serta seluruh lapisan masyarakat.

Upaya perusahaan berkomitmen melalui CSR kepada *stakeholders* untuk mempertanggungjawabkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang dilakukan atas aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, aspek sosial, lingkungan dan ekonomi harus ada dalam CSR. Dengan adanya CSR yang dilakukan perusahaan berhubungan erat dengan pembangunann berkelanjutan, dimana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusan tidak hanya berdasarkan dampak dalam aspek ekonomi, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik itu jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

John Elkington mengembangkan sebuah konsep yang disebut sebagai *triple bottom line* pada tahun 1997 dikutip oleh Kinasih,dkk (2018). Dalam *triple bottom line* menyatakan bahwa setiap entitas bisnis harus menerapkan konsep 3P, dimana selain berfokus pada penciptaan laba (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan keterlibatannya dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat (*people*) serta menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi *financial* nya saja, namun harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Dalam hal ini perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga reputasi perusahaan juga meningkat di mata masyarakat, jadi masyarakat akan berkeinginan membeli produk perusahaan.

Di Indonesia, praktik CSR semakin menguat terutama setelah diberlakukan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 poin 3 yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai upaya melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 ini menegaskan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kewajiban pengungkapan lingkungan di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain adalah pernyataan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari PSAK No. 1 (revisi 1998) mengenai penyajian laporan keuangan pada bagian informasi tambahan, yaitu :

“perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*) khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Pemerintah Indonesia juga telah mewajibkan pengungkapan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ini dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, pengungkapan CSR hanya sebatas sukarela dari perusahaan. Namun kehadiran Undang-Undang tersebut

membuat pengungkapan CSR menjadi wajib dilakukan. Standar pengungkapan lingkungan yang berkembang di Indonesia adalah merujuk standar yang dikembangkan GRI (*Global Reporting Initiatives*). *Global Reporting Initiatives* pertama kali disusun pada tahun 1997 oleh *The Boston-based Coalition on Environmentally Responsible Economies* (CERES).

Pengungkapan CSR dapat dilakukan perusahaan melalui bermacam-macam media sebagai bentuk pertanggungjawaban pada para *stakeholder* disamping itu juga sebagai langkah dalam menjaga reputasi. Pengkomunikasian segala aktivitas maupun program CSR dianggap oleh sebagian besar perusahaan sangat penting, karena dengan begitu masyarakat semakin banyak yang mengetahui aktivitas social yang dijalankan perusahaan untuk kepentingan umum, maka hal tersebut dapat menurunkan risiko perusahaan menerima gejolak sosial.

Pengungkapan CSR bagi perusahaan dapat mendatangkan keuntungan dan manfaat yang diperoleh antara lain, yaitu *Brand Differentiation*, *Human Resources* dan *License to Operate*, serta *Risk Management*. *Brand Differentiation* yaitu CSR dapat memberikan citra yang baik dan khas bagi perusahaan dan hal tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada *customer* yang akhirnya tercipta *customer loyalty*. Disamping itu, CSR juga memberikan kemudahan dalam perekrutan karyawan baru (*human resource*) yang berkualifikasi tinggi sedangkan bagi karyawan perusahaan sendiri CSR dapat lebih meningkatkan reputasi dan dedikasi. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik dapat lebih mudah memperoleh izin bisnis (*licence to*

operate), karena pemerintah menganggap telah memenuhi standar operasi dalam kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR membuat reputasi perusahaan tetap terjaga dan jika perusahaan dapat mempertahankan reputasi itu, maka dapat lebih mudah dalam mengelola resiko bisnis (*risk management*).

Pengungkapan CSR dalam penelitian ini menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK nomor 29/POJK.04/2016. OJK mengeluarkan surat edaran Nomor 30/SEOJK.04/2016. Pada surat edaran tersebut terdapat empat komponen utama yang harus ada dalam laporan perusahaan, yaitu lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan kerja, pengembangan sosial dan masyarakat, dan tanggung jawab barang dan jasa. Berikut merupakan indikator berdasarkan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016:

- 1) Lingkungan Hidup
 - a) Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang
 - b) Sistem pengolahan limbah emiten atau perusahaan public
 - c) Mekanisme pengaduan masalah lingkungan
 - d) Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki
- 2) Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
 - a) Kesetaraan gender dan kesempatan kerja
 - b) Sarana dan keselamatan kerja
 - c) Tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan

- d) Tingkat kecelakaan kerja
 - e) Pendidikan dan pelatihan
 - f) Remunerasi
 - g) Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan
- 3) Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
- a) Penggunaan tenaga kerja local
 - b) Pemberdayaan masyarakat sekitar emiten atau perusahaan public antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi
 - c) Perbaikan sarana dan prasarana social
 - d) Bentuk donasi lainnya
 - e) Komunikasi mengenai kebijakan dn prosedur anti korupsi di emiten atau perusahaan publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada)
- 4) Tanggung jawab barang dan jasa
- a) Kesehatan dan keselamatan konsumen
 - b) Informasi barang dan jasa
 - c) Sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Manajemen laba dengan variabel lain seperti *Tax Planning*, Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Risiko Litigasi, Kepemilikan Manajerial,

Leverage, Komite Audit, Asimetri Informasi, *Return On Asset*, Kebijakan Deviden, *Price Earing Ratio*, *Price to book value*, *Earning per share* dan Profitabilitas. Berikut beberapa ringkasan hasil rangkuman penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rowland Bismark Fernando Pasaribu, Dionysia Kowanda dan Esty Dwi Widyastuty (2016)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Deviden, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Price Earning Ratio</i> , <i>Price Book Value</i> dan <i>Earning per Share</i> terhadap Manajemen Laba (Studi pada Emiten Manufaktur di BEI Periode 2008-2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba, kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, <i>Price Earning Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, <i>Price Book Value</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan <i>Earning per Share</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Ni Nyoman Erni Yanuar Paramita, Edy Sujana dan Nyoman Trisna Herawati (2017)	Pengaruh Financial Distress, Risiko Litigasi dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur	Hasil penelitian ini menunjukan <i>financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, risiko litigasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba dan pengungkapan CSR

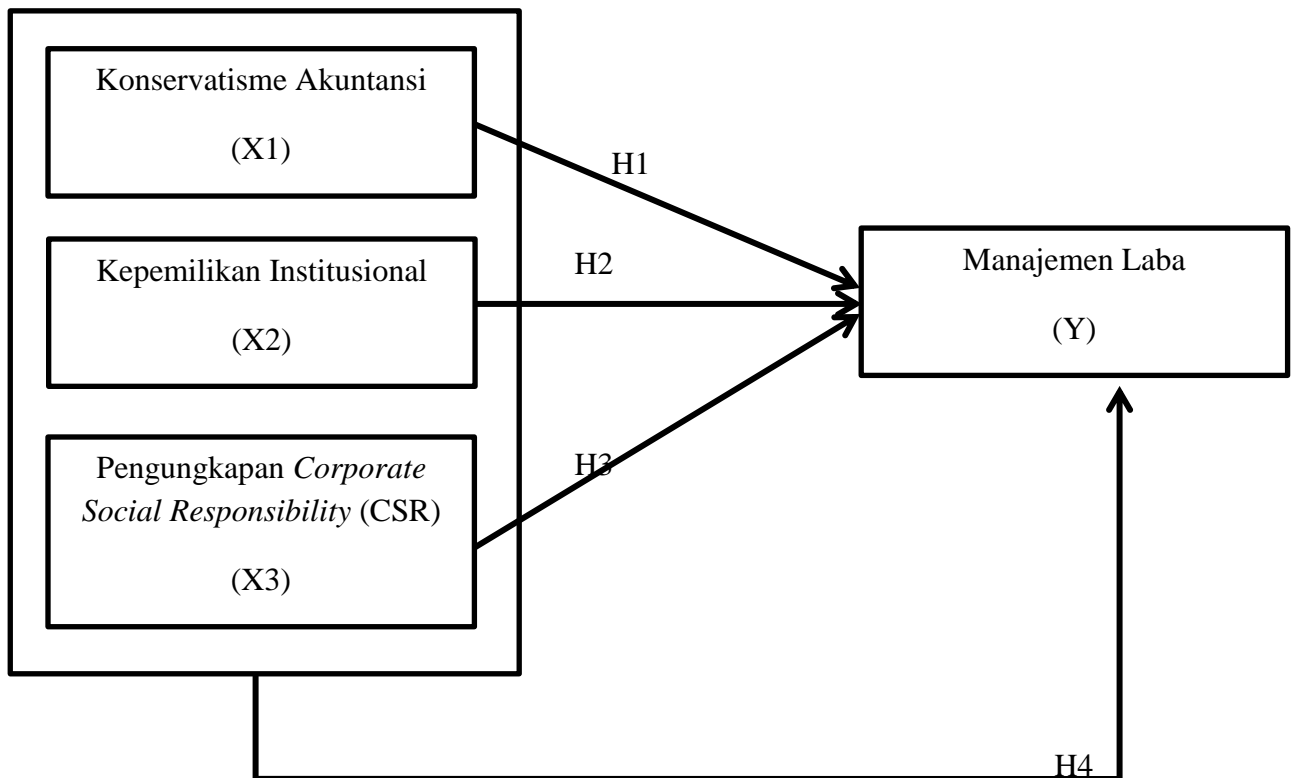
		yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016)	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.
3	Dendi Purnama (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2010-2015)	Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
4	Ni Made Apsari Dwijayanti dan I Ketut Suryanawa (2017)	Pengaruh Asimetri Informasi, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
5	Dewi Kusuma dan Desifa Kurnia(2018)	Pengaruh <i>Tax Planning</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap Manajemen Laba.	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>tax planning</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba dan CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
6	Putri Warislan, Wirmi Eka dan Wiwik T (2018)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Pengungkapan <i>Corporate Social</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan konservatisme akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba dan

		<i>Responsibility</i> (CSR) terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)	pengungkapan CSR secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
7	Elizabeth Sarah Febrina Br Tampubalon (2019)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility, Return On Asset, Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, <i>return on asset</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
8	Aga Arye Perdana (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
9	Eka Dian Saputri dan Henny Mulyanti (2020)	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2013-2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan konservatisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan variabel dependennya adalah Manajemen Laba. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini,

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.5 Perumusan Hipotes

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Manajemen Laba

Konservatisme dapat didefinisikan sebagai praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespon berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespon berita baik (*good news*) (Sarra, 2017). Berdasarkan *agency theory* konservatisme akuntansi dapat mengurangi konflik keagenan antara *agent* kepada *principal*. Konservatisme merupakan prinsip memaksakan pengakuan tepat waktu dalam mengakui kerugian dan menunda pengakuan keuntungan, dalam hal ini dapat mengurangi kesempatan untuk manajer berhasil mengaplikasikan praktik manajemen laba (Prabaningrat & Widanaputra, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Wibisono dan Fuad (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H₁ : Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Dwijayanti & Suryanawa, 2017). Berdasarkan *agency theory* kepemilikan institusional dianggap dapat mengurangi konflik antara *agent* kepada *principal* yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan

terhadap kinerja pihak manajemen untuk melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen melakukan praktik manajemen laba dan memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Cahyani dan Hendra (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H₂ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.5.3 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Manajemen Laba

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Berdasarkan *agency theory* pengungkapan CSR dapat mengurangi konflik kepentingan *agent* kepada *principal* karena *principal* menginginkan perusahaannya mendapatkan *image* positif dimata masyarakat maupun investor. Menurut Paramita, dkk (2019) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H₃ : *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.5.4 Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Laba.

Konservatisme akuntansi adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aset dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkup ketidakpastian (Warislan dkk, 2018). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Perdana, 2019). Pengungkapan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggung jawabkan dampak dari operasi perusahaan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, serta memastikan aktifitas operasi perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, secara parsial masing-masing variabel memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Maka perumusan hipotesis yg dapat disimpulkan oleh peneliti secara simultan adalah:

H₄ : Konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh simultan terhadap manajemenlaba.